

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rasyid. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Achmad Ruslan. 2023. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Amran Suadi. 2014. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*. PT RajaGrafindo. Depok.
- Andriansyah, dkk. 2021. *Academic Constitutional Drafting: Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Terkait Dengan Pokok-Pokok Haluan Negara*. Badan Pengkajian MPR RI. Jakarta.
- Asmak UI Hosnah, dkk, 2021. *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, PT. Radjagrafindo Persada. Depok.
- Bagir Manan. 2009. *Menegakan Hukum Suatu Pencarian*. Asosiasi Advokat Indonesia. Jakarta.
- E. Fernando Manulang. 2017. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Cetakan kedua, PT. Kharisme Putra Utama, Jakarta.
- Eny Kusdarini. 2019. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*. UNY Press. Yogyakarta.
- Farid Wajid. Dkk. 2020. *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Fajlurrahman Jurdi. 2022. *Etika Profesi Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Halim Hs. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers. Jakarta.
- I.D.G. Palguna. 2020. *Welfare State VS Demokrasi: Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*. Cetakan Kedua, PT. Radjagrafindo Persada. Depok.
- I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cetakan Kedua. Kencana. Jakarta.

- Indiharto. 2002. *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Cetakan ketiga. Mira Buana Media. Yogyakarta.
- J.H.A. Logemann, 1954, *Het Staatsrecht Van Indonesie*, W. Van Hoeve, in Dutch. (Diterjemahkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020).
- Jimly Asshiddiqie. 2021. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Cetakan kedua. Sinar Grafika. Jakarta.
- _____. 2012. *Perkembangan & Konsolidasi lembaga Negara Pasca Reformasi*. Cetakan kedua. Sinar Grafika. Jakarta.
- Joenady Efendy dan Johnny Ibrahim, 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana. Jakarta.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Nomensen Sinamo. 2010. *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara. Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Ke-10. UGM Press. Yogyakarta.
- Prajudi Admosudirjo. 1998. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- P.M. Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-13. Kencana. Jakarta
- _____. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Revisi. Prenada Media. Jakarta.
- Rasyid, Abdul. 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*, cetakanke-16, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- _____. 2009. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi Negara*. FH UII Press. Yogyakarta.
- RomiLibrayanto, 2010, *Ilmu Negara: Suatu pengantar*, Cetakan Kedua, Pustaka Refleksi, Makassar.

SF. Marbun. 2014, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak*. FH UII Press. Yogyakarta.

Wiryanto, 2019. *Etik Hakim Konstitusi*, Rajawali Pers. Depok.

Yusri Munaf. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Marpoyan Tujuh. Pekanbaru.

Penelitian Skripsi/Tesis/Disertasi

Andriansyah. 2022. Kedudukan Hukum Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Hamid Atamimi. 1990. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Disertasi* Universitas Indonesia. Jakarta.

Maulana Ishaq. 2016. Penggunaan Hakim Tunggal Pada Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Islam Sunan Kalijaga. Jakarta.

Artikel Jurnal

Abdul Malik. Perspektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1. Tahun 2008.

Adisti Pratama Ferevaldy. Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Gugatan Sederhana (Small Claim Court). *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 3 No. 2. Tahun 2018.

Afid Nufitra. dkk. Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks And Balaces Dalam Sistem Ketatanegaraan. *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 3, No. 1. Tahun 2021.

Arini Nur Annisa, Dkk. Government Supervision of The Right Fullfilment of Housed Workers in The Transition Period. *Awang Long Law Review*. Vol 50, No. 1. Tahun 2022.

Bivitri Susanti. Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Jentera*. Vol. 12, No. 1. Tahun 2017.

- Eza Aulia. Sistem Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi Dlam Mewujudkan Independensi Hakim. *Jurnal Public Policy*. Vol. 2, No. 1. Tahun 2018.
- Fajlurrahman Jurdi. Dkk. Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 50, No 3. Tahun 2019.
- Fauziah. Pro Kontra Penegakan Etik Secara Internal dan Eksternal. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol. 1, No. 1. Tahun 2021.
- Hadi Sofan. Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara. *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 5, No. 2. Tahun 2017.
- Haris Kurnia. Implikasi Pengisian Jabatan Hakim Sebagai Pejabat Negara Terhadap Sistem Peradilan. *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 5, No. 1. Tahun 2021.
- Ishar Elmi. Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* Vol. 6, No. 1. Tahun 2019.
- M. Fajlur Falaakh. Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Bunga Rampai: Potret Penegakan Hukum di Indonesia*. Komisi Yudisial. Tahun 2009.
- Philipus M Hadjon. Tentang Wewenang, *Jurnal Yuridika*, Vol. 5 No. 6. Tahun 1997.
- Sutan Sorik. dkk, Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013). *Jurnal Konstitusi* Vol. 15, No. 3. Tahun 2018.
- Zuhad Aji. Menimbang Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 4.

Sumber Website

- Achmad fauzi. 2020. Hakim, Putusan, dan Tuah Buku, <https://www.pa-penajam.go.id> [diakses pada 15 Juli 2022].
- Eri Sinaga. Bagir Manan dan Eks Wakil Kepala BIN Jadi Anggota Majelis Kehormatan MK Sidang Patrialis Akbar. *Tribun News*, 27 Januari

2017. <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/01/27/bagir-manan-dan-eks-wakil-kepala-bin-jadi-anggota-majelis-kehormatan-mk-sidang-patrialis-akbar> [diakses pada Kamis, 8 Desember].

Jimly Asshidiqie. Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas dan Tidak Memihak. 22 Juni 2019 diakses pada <http://www.jimly.com/pemikiran/view/11> (diakses pada Kamis, 8 Desember 2022).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5226.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5456.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Nomor 216 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial,

Lembaran Negara Nomor 106 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5250.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Nomor Tahun 2009, Tambahan lembaran Negara Nomor 4958.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaran Negara Nomor 85 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4654.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Dewan Kehormatan Komisi Yudisial.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-VI/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK-SPL/II/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016